

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : AGUS WIDYANTO
NIK : 3521101608820006
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Jabatan : SEKRETARIS
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 1 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS WIDYANTO

2. Jabatan : SEKRETARIS

3. NHK : 453000

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 815.000.000

1. Tanah Seluas 1.120 m2 di KAB / KOTA NGAWI, HASIL SENDIRI

Rp. 120.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 407 m2/187 m2 di KAB / KOTA NGAWI, Rp. 410.000.000

3. Tanah Seluas 2.600 m2 di KAB / KOTA NGAWI, HASIL SENDIRI
Rp. 285.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 218.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI

Rp. 3.000.000

2. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 26.689.626

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.059.689.626

III. HUTANG Rp. 40.344.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.019.345.626



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.